

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MEMPERSIAPKAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI  
SULAWESI SELATAN**

Thasya Adelia Bunga Parrangan  
NPP. 30.1230

*Asdaf Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan*  
*Program Studi Politik Indonesia Terapan*  
Email: [thasyaadeliaparrangan@gmail.com](mailto:thasyaadeliaparrangan@gmail.com)

Pembimbing Skripsi :Dr. Dra. Hj. Meltarini, M.Si

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** The previous election in North Toraja district was held in a pandemic situation in 2020. Despite facing Covid-19, the North Toraja district government succeeded in making the election successful by holding face-to-face direct elections at polling stations. The strategy used by the General Election Commission at that time was different from the socialization carried out in the previous elections, because the North Toraja Regency government required all citizens to apply social distancing and not interact too much with other people. **Purpose:** This journal aims to find out, analyze and review the strategy carried out by the KPU of North Toraja Regency, South Sulawesi Province in preparing for the Election of the Regent and Deputy Regent and the DPRD. **Method:** the method used is a qualitative method with data collection, interviews and analysis conducted by the author and uses strategy theory according to SWOT analysis with 4 dimensions, namely strengths, weaknesses, opportunities and threats. **Results/Findings:** the results of this study are that the strategy carried out by North Toraja district in preparing for the 2024 elections has been going well. **Conclusion:** this study concludes that the strategy used in preparing for the 2024 elections is by conducting socialization.

**Keywords:** Strategy, General Election Commission, Election Commission

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pemilihan sebelumnya di kabupaten Toraja Utara dilaksanakan dalam keadaan pandemi tahun 2020. Meskipun dilanda covid-19, pemerintah kabupaten Toraja Utara berhasil meyukseskan Pemilu tersebut dengan pelaksanaan pemilihan langsung secara tatap muka di TPS. Strategi yang digunakan Komisi Peilihan Umum pada saat itu berbeda dengan pelaksanaan sosialisasi pada pemilu sebelumnya, sebab pemerintah Kabupaten Toraja Utara mewajibkan seluruh rakyat untuk menerapkan pembatas jarak dan tidak terlalu berinteraksi dengan orang lain. **Tujuan:** Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan meninjau strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan dalam mempersiapkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati beserta DPRD. **Metode:** adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data, wawancara dan analisis yang dilakukan oleh penulis dan menggunakan teori strategi menurut analisis SWOT dengan 4 dimensi yaitu *strengths, weakness, opportunities dan threats*. **Hasil/Temuan:** hasil penelitian ini yaitu strategi yang dilakukan kabupaten Toraja Utara dalam mempersiapkan Pemilu tahun 2024 sudah berjalan dengan baik. **Kesimpulan:** penelitian ini berkesimpulan bahwa strategi yang digunakan dalam mempersiapkan pemilu tahun 2024 dengan melakukan sosialisasi.

**Kata kunci :** Strategi, Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk membuat keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses dimana orang dipilih untuk jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut bervariasi mulai dari presiden, anggota parlemen di berbagai tingkat pemerintahan, hingga kepala desa. Pemilu merupakan salah satu upaya untuk mempengaruhi masyarakat secara persuasif (tidak memaksa) melalui kegiatan retorik, hubungan masyarakat, komunikasi massa, lobi dan kegiatan lainnya. Menurut Soedarsono (2005:1), "Pemilihan umum merupakan syarat minimal demokrasi dan tujuannya adalah terpilihnya anggota parlemen, wakil daerah dan presiden untuk membentuk pemerintahan yang demokratis". Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pemilihan anggota parlemen di Indonesia. Feri Kurnia Rizkiyansyah (2007:78) menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga khusus yang mengatur proses pemilihan umum di Indonesia. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar (1945), Komisi Pemilihan Umum adalah badan khusus yang menyelenggarakan pemilihan parlemen yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Meskipun agitasi dan propaganda dikritik keras di negara-negara demokrasi, kandidat atau politisi dalam kampanye pemilihan umum sering menggunakan teknik agitasi dan propaganda sebagai sarana komunikasi politik. Dalam pemilihan, pemilih juga disebut pemilih, dan mereka ditawarkan janji dan program mereka oleh pemilih dalam kampanye. Kampanye dilakukan pada waktu yang telah ditentukan sebelum hari pemilihan, setelah pemungutan suara penghitungan suara dimulai. Pemenang pemilu ditentukan dengan aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya diputuskan dan diterima oleh peserta dan disosialisasikan kepada pemilih. Pada tahun 2024 akan dilaksanakan pemilu serentak dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Pemilihan Kepala Daerah akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2024 dan bagi pemilihan legislatif akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Pemilu serentak dilakukan karena Indonesia merupakan negara Demokrasi



dimana negara tersebut mengharuskan rakyatnya untuk memilih sendiri pemimpin mereka dengan cara pungutan suara. Negara Indonesia melakukan Pemilu serentak untuk pertama kalinya dalam sejarah. Untuk itu Pengaturan Undang-undang pemilu harus mampu memfasilitasi pelaksanaan pemilu karena pemilu tahun 2024 ini akan membutuhkan banyak biaya dan SDM yang harus cukup serta program pemerintah yang tepat guna untuk menyukseskan pemilu serentak tahun 2024. Pemilu serentak ini diharapkan mampu menstabilkan roda pemerintahan. Dimana tahun-tahun sebelumnya pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota legislatif berbeda tiap daerah dan juga berbeda tiap tahunnya, sehingga dinilai menjadi salah satu alasan pengaruh pemerintahan tidak stabil.

### **1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)**

Pada tahun 2020 Kabupaten Toraja Utara menyelenggarakan pemilihan umum bagi kepala daerah dan anggota legislative. Pemilihan umum dilaksanakan dalam keadaan pandemi Covid-19, Namun pemilu tetap berjalan dengan baik. Namun, untuk pemilu serentak tahun 2024 tidak dilaksanakan dalam masa pandemi lagi. Oleh sebab itu, penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimanakah strategi komisi pemilihan umum dalam mempersiapkan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Toraja Utara provinsi Sulawesi Selatan?

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut. Penelitian Siti Muthmainnah (2022) berjudul Politik Identitas *Gender* Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Menemukan bahwa isu politik identitas *gender* dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan dukungan suara. Penelitian Regan Raditya Nirwasita Harmanta (2022) dengan judul Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kota Tangerang, menemukan bahwa Memberikan kesempatan setara kepada pemilih pemula dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat. Penelitian Prilla liandini (2020) berjudul Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi selatan, menemukan bahwa Bentuk partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Presiden berupa pemberian suara (*voting*).

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Dari perbandingan skripsi sebelumnya, maka penulis akan mengambil judul penelitian strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam mempersiapkan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data, wawancara dan analisis yang dilakukan oleh penulis dan menggunakan teori strategi menurut analisis SWOT dengan 4 dimensi yaitu *strengths, weakness, opportunities dan threats*.

### **1.5 Tujuan**

Pelaksanaan penelitian ini memiliki maksud dan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi Komisi Pemilihan Umum dalam mempersiapkan pemilihan umum Tahun 2024 di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan.

## **II. METODE**

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi peniaian terhadap faktor kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*). Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang (*Opportunity*) dan tantangan (*Threats*). Metode kualitatif adalah dengan cara pengumpulan data melalui

dokumentasi, wawancara dan studi pustaka. Penulis melakukan wawancara mendalam terhadap Kepala Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara, Divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Toraja Utara, Kepala Bagian Teknis Pemilu Dan Hupmas Kantor KPU Kabupaten Toraja Utara dan 10 orang masyarakat.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan analisis SWOT dimana terdapat 4 dimensi yang membahas strategi KPU Kabupaten Toraja Utara dalam mempersiapkan Pemilihan Umum tahun 2024 yang akan dibahas sebagai berikut.

#### 3.1 Strengths (Kekuatan)

Dan pada pemilihan umum yang akan berlangsung tahun 2024 menggunakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal tentang penyelenggaraan Pemilihan umum tahun 2019. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota adalah Undang -Undang yang akan dipedomani dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Serta Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan Dan Alokasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan umum tahun 2024. Sebelum pelaksanaan Pemilu diselenggarakan, pasti ada pihak yang bekerja keras dan bertanggung jawab atas kesuksesan pemilu tahun 2024 mendatang. Dan semua itu tidak lepas dari anggota KPU Kabupaten Toraja Utara. Adapun anggota KPU beserta tingkat pendidikannya sebagai berikut.

**Tabel Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara**

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1.	Bonnie Freedom, S.Pd	Ketua (Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik)	S1- Pendidikan Bahas Inggris
2.	Jan Hery Pakan, S.T	Divisi Teknik Penyelenggaraan	S1- Teknik Elektro
3.	Roy Ple Pasali, S.Soc	Divisi Hukum dan Pengawas	S2- Administrasi Publik
4.	Simeon Sarira, S.E	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	S2- manajemen Keuangan Daerah
5.	Ashar Tangkesalu, A.Md,Kep.	Sosialisasi, pendidikan pemilih, Partisipasi masyarakat, dan SDM	D3- Keperawatan
6.	Drs. Henok Tamba, M.A.P	Sekretaris	S2
7.	Halia Pabesar, S.E	KA. Subbag program dan data	S1
8.	Ivel Ashari, S.IP., M.A	Staf pelaksana Subbag program dan data	S2
9.	Mulyati, A.Md.Kom		S2
10.	Riski Meltarini	KA. Subbag Keuangan,	S1



	Tandi, S.Kom	Umum dan Logistik	
11.	Dian Mayasari, A.Md	Staf pelaksana Keuangan,	S1
12.	Krismanase Bangapadang,A.Md	Umum dan Logistik	S1
13.	Mega Yabes rantelembang, S.E., M.Si.	KA. Subbag Teknis dan Hupmas	S2
14.	Nurwahidin Mattjirinnah, S.E	Staf pelaksana Subbag Teknis dan Hupmas	S1
15.	Ardianty Rahman S.IP., M.Si		S2
16.	Musdalifah, S.IP		S1
17.	Markus Rego, S.E.	KA.Subbag hukum	
18.	Gustiani Arruanbamba B.,S.E.	Staf Pelaksana Subbag Hukum	S1
19.	Agustina S. Pairingan, S.E.,M.Ak		S2

Pada saat tahap persiapan pilkada, pengawasan tidak bisa terpusat pada kantor KPU saja. Untuk itu, KPU membentuk PPK,PPS dan KPPS guna bekerjasama menyukseskan pemilihan umum. Hal ini tercantum pada PKPU Nomor 3 Tahun 2016 didalam bab II Pasal 5 terdapat tahap persiapan penyelenggaraan Pilkada salah satunya ialah membentuk PPK, PPS dan KPPS (Badan *Ad Hoc*). Pembentukan Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) maupun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terbentuk dengan proses yang ketat ditambah dengan adanya bimbingan teknis kepada para PPK,PPS maupun KPPS agar kemampuan dapat meningkat. Kelompok ini sangat membantu dalam hasil penghitungan suara yang cepat , tepat dan akurat.

### 3.2 Weaknesses/ Kelemahan

Undang – Undang tiap saat menjelang pemilu akan selalu berganti. seperti yang dapat diketahui seperti pada pemilu tahun 2014 mempedomani Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang dan pada pemilu tahun 2019 mempedomani Peraturan komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Umum tahun 2019. Kemudian Pada pemilu yang akan dilaksanakan tahun 2024 mempedomani Undag –Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang. Dan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Alasan Undang-undang setiap pemilu berbeda karena ada kebutuhan yang harus disesuaikan dengan perubahan yang terjadi didalam masyarakat, adanya kebutuhan untuk memperbaiki Undang-undang yang ada dan adanya kepentingan politik untuk memanfaatkan pemilu sebagai ajang untuk memperoleh kekuasaan. Selain itu, Ketentuan Undang-Undang pemilihan Umum atau pemilihan kepala daerah yang selalu berubah membuat penyelenggara rentan dipersoalkan dengan etika atau rentan dipidana. Dalam melaksanakan Pemilu KPU tidak bisa melaksanakannya sendiri. Oleh sebab itu, KPU membentuk badan Ad Hoc yang terdiri dari PPK,PPS dan KPPS. Namun, anggota PPK,PPS dan KPPS tidak dipilih begitu saja. Terdapat syarat dan Seleksi tersendiri bagi para calon anggota PPK,PPS dan KPPS. Namun sangat disayangkan, anggota PPK, PPS dan KPPS ini berganti setiap pelaksanaan

pemilu. Selain itu, terdapat kesulitan dalam perekrutan pada anggota PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pungut hitung. Dimana pelaksanaan penghitungan suara dilakukan secara manual, sehingga harus membuat anggota PPK harus benar-benar focus dan berhati-hati saat menghitung. Program KPU untuk mensukseskan pemilu adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu KPU membentuk Badan Ad Hoc yang didalamnya terdapat PPK, PPS dan KPPS yang akan membantu KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. Namun, anggota PPK, PPS dan KPPS tidak dipilih begitu saja. Terdapat syarat dan Seleksi tersendiri bagi para calon anggota PPK, PPS dan KPPS. Setelah terpilih, anggota PPK, PPS dan KPPS dilatih minimal 3 kali dalam sebulan. Namun, tidak ada kejelasan karir bagi anggota PPK, PPS dan KPPS setelah pelaksanaan pemilu selesai atau setelah tugas mereka selesai.

### **3.3 Opportunities/ Peluang**

KPU Kabupaten Toraja Utara telah melaksanakan Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Pembagian Kursi Anggota DPRD Kota/DPRD Kota pada Pemilu Tahun 2024 yang bertempat di aula kantor KPU Toraja Utara Wilayah. Pertukaran tersebut dihadiri oleh Bawaslu Presiden Toraja Utara, Dir Intel Polda Toraja Utara, Lembang dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perdana Menteri Toraja UKI, Sekda Kesbangpol Toraja Utara, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda. Pimpinan partai politik Kabupaten Toraja Utara dan liputan media di Kabupaten Toraja Utara. Adanya kursi anggota DPRD dalam Pemilu tahun 2024 yang disampaikan oleh Jan Hery Pakan, S.T selaku ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU kabupaten Toraja Utara dalam sosialisasi tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi Anggota DPRD kabupaten Toraja Utara adalah sebagai berikut. Toraja Utara 1 meliputi kecamatan Rantepao, Tikala dan Tallunglipu dengan 7 kursi umum; Toraja Utara 2 meliputi kecamatan Sesea, Kecamatan Sa'da, Kecamatan Balusu, Kecamatan Bangkelekila dan Kecamatan Sesea Suloara dengan 6 kursi; Toraja Utara 3 meliputi kecamatan Nanggalala, Buntao, Tondon dan Rantebua dengan 5 kursi; Toraja Utara 4 meliputi Kabupaten Sanggalang, Kesu dan Sopai 6; Toraja Utara 5 meliputi Kecamatan Dende'Piongan Napo, Kecamatan Kapala Pitu, Kecamatan Awan Rante Karua, Kecamatan Baruppu dan Kecamatan Buntu Pepasani dalam pembagian 6 kursi. Sebelum tahapan pendaftaran, verifikasi dan identifikasi partai politik peserta pemilu 2024, KPU Kabupaten Toraja Utara akan melakukan sosialisasi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan identifikasi peserta partai politik untuk Pemilihan Umum. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Aula Kantor KPU Kabupaten Toraja Utara, Jl. Taman Makam Pahlawan Nomor 65, Desa Rante Pasele, Kecamatan Rantepao. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan sosialisasi kepada partai politik peserta pemilu 2024 yang telah mendapatkan akun bawang merah dari KPU RI dan berlokasi di Wilayah Utara serta memberikan informasi persiapan. KPU Kabupaten Toraja Utara akan mengajarkan dasar hukum pendaftaran, verifikasi dan pencalonan partai politik sebagai calon peserta pemilu tahun 2024. Kantor KPU Kabupaten Toraja Utara telah melaksanakan sosialisasi penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Toraja Utara, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Uslimin; Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, Perwakilan Kemenag Toraja Utara, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Toraja Utara, Perwakilan Dandim 1414 Tana Toraja, Wakapolres Toraja Utara, Perwakilan Kesbangpol, Sekretaris Kominfo Kabupaten Toraja Utara, Perwakilan Dinas Sosial, Ketua APDESI Kabupaten Toraja Utara, Sekcam Tondon, Sekcam Tikala, Perwakilan Rumah Sakit Elim Rantepao, dan Partai Politik. Pemilih itu berasal dari data kependudukan. Hasil Pemutakhiran Informasi Pemilih Berkelanjutan (PDPB) digunakan sebagai sumber informasi Badan Pemilihan Umum dan disinkronkan dengan Daftar Calon Pemilih Tetap (DP4) sehingga diharapkan akan lebih efisien dan efektif. Tujuan dari sosialisasi ini adalah



untuk menghadirkan informasi pemungutan suara yang benar dan bertanggung jawab. Periode pemilih pada bulan September 2022 mencapai 167.157 jiwa. Periode pemilih ini menurun jika dilihat dari 3 bulan terakhir.

### **3.4 Threats/ Ancaman**

Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 akan membutuhkan kertas suara yang lebih banyak dari pada pemilihan Umum sebelumnya. Seluruh daerah di Indonesia harus menerima surat suara dan kotak suara. Dalam hal pendistribusian surat suara dan kotak suara, ditakutkan tidak tiba tepat waktu ke daerah yang ditargetkan karena terkendala dijalan ataupun tidak memenuhi jumlah kertas suara yang dibutuhkan tiap daerah. Oleh sebab itu, kertas surat suara dibuat sederhana untuk meminimalisir hal tersebut terjadi. Teknologi yang semakin canggih dan disertai dengan akses jaringan internet yang mudah dijangkau serta pengetahuan masyarakat yang tidak tertutup lagi akan teknologi sehingga besar kemungkinan siber akan membobol keamanan data pemilih. Apalagi, Kartu Identitas Penduduk sudah dalam bentuk elektronik atau yang biasa disebut E-KTP. Serangan siber dapat berimbas pada pada kekacauan politik sampai ancaman serangan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berisikan data warga negara yang memiliki hal politik secara hukum. Namun, untuk melindungi data pemilih agar tetap aman, KPU RI telah meluncurkan Aplikasi Mobile Lindungihakmu yang dapat didownload di playstore. Dan KPU Kabupaten Toraja Utara telah melaksanakan sosialisasi aplikasi Lindungihakmu untuk mewujudkan pemilih berkualitas dan berintegritas. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengelola informasi pemilih dari smartphone dengan mudah, cepat, dan aman. Selain untuk mengontrol data pribadi, tiga fungsi dapat dilakukan, yaitu: mendaftar sebagai pemilih, mengubah data diri dan menghapus informasi yang tidak memenuhi persyaratan (TMS). Pendidikan politik sangat penting didalam masyarakat dan wajib untuk diajarkan sejak dini. Pendidikan politik bertujuan untuk membantu setiap warga negara untuk hidup cerdas, responsif dan aktif dalam masyarakat demokratis. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan bijaksana dalam menyikapi sebuah berita Hoaks. Di dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, salah satu cara yang digunakan untuk menjatuhkan lawan politik adalah dengan menyebarkan berita yang tidak benar atau melebih-lebihkan sesuatu untuk menjatuhkan lawan politik. Selain itu, Berita hoaks yang beredar didalam masyarakat juga menyebabkan ketakutan atau kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga menimbulkan rasa tidak percaya lagi kepada pemerintah.

### **3.5 Diskusi Temuan utama Penelitian**

Pelaksanaan persiapan pemilu tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik. Mulai dari sosialisasi Undang-Undang hingga Aplikasi perlindungan data Kependudukan kepada masyarakat. Penulis menemukan temuan penting yakni tidak selamanya yang harus memimpin adalah dari kaum pria, namun kaum wanita juga layak mendapat kedudukan kepemimpinan dalam politik. Sama halnya dengan temuan Siti Muthmainnah (2022) bahwa isu politik identitas *gender* dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan dukungan suara. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya karena temuan ini membahas strategi untuk mempersiapkan pemilu serentak tahun 2024 agar terlaksana dengan baik dimana Negara Indonesia akan membuat sejarah pertama kali pemilihan serentak dilaksanakan.

## **IV. KESIMPULAN**

Strategi KPU Kabupaten Toraja Utara dalam mempersiapkan pemilu Kepala Daerah tahun 2024 adalah dengan melakukan sosialisasi. adapun sosialisasi yang dilakukan antara lain sosialisasi tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2023 tentang Daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sosialisasi pemilih Kabupaten Toraja Utara periode September

berjumlah 167.157, sosialisasi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan identifikasi peserta partai politik untuk Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum tahapan pendaftaran, verifikasi dan identifikasi partai politik peserta pemilu 2024 dilaksanakan, sosialisasi penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital digunakan untuk mempermudah mengakses data tanpa harus membawa kartu fisik dan sosialisasi Aplikasi Lindungihakmu untuk mendapatkan data pemilih yang berkualitas dan pemilu yang berintegritas.

**Keterbatasan Penelitian.** Keterbatasan ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga dilakukan dalam satu tempat saja sebagai model studi sebagai modal kasus yang dipilih.

**Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, Oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjut pada lokasi serupa berkaitan dengan Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam mempersiapkan Pemilihan umum guna menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Soedarsono, 2015. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Rizkiyansyah.2020. *Pemilihan Umum*. Publisher: CV. Pustaka Ilmu Group

Muthmainnah Siti. 2022. *Politik Identitas Gender Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi*

Nirwasita Harmanta Regan Raditya. 2022. *Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kota Tangerang*

Liandini, Prilla. 2020. *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi selatan*

Kantor komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara 2023